

Abstrak

Legisius Oki. 19.75.6618. *Membaca Fenomena Tindakan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Terang Teori Tindakan Politik Hannah Arendt*. Skripsi. Program Studi Filsafat. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan Hannah Arendt tentang tindakan politik; *kedua*, menjelaskan fenomena tindakan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; *ketiga*, mengimplementasikan teori tindakan politik Hannah Arendt terhadap kehidupan politik dan persoalan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus kajian saya dalam penulisan skripsi ini adalah membaca persoalan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam terang teori tindakan politik Hannah Arendt. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam proses penyusunan skripsi ini. Adapun sumber utama dari penulisan skripsi ini adalah buku karya Hannah Arendt yang berjudul *The Human Condition*. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber lain seperti; buku, jurnal ilmiah, kamus, dan internet.

Berdasarkan kajian teoretis, ada beberapa temuan penting. *Pertama*, salah satu ancaman terbesar untuk kehidupan sosial politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Persoalan korupsi pada hakikatnya lahir dari kegagalan berpikir dan bertindak para pejabat publik. Selain itu, tindakan korupsi juga merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik. Tindakan korupsi yang melahirkan kejahatan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial politik dipraktikkan rezim totalitarianisme Nazi dengan tujuan untuk mengalienasi sekaligus memusnahkan bangsa Yahudi di Jerman. Tindakan kejahatan yang memporak-porandakan kehidupan sosial politik masih ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan adanya tindakan korupsi.

Kedua, tindakan korupsi merusakkan ruang publik atau dunia bersama yang dikenal dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, sebagai upaya untuk mengatasinya, para pejabat publik dan masyarakat Nusa Tenggara Timur harus membangun kebiasaan berpikir kritis dan rasa tanggung jawab terhadap dunia bersama. Membangun kemampuan berpikir kritis dan rasa tanggung jawab sesungguhnya merupakan konsep kunci Hannah Arendt ketika berbicara tentang tindakan politik dan dunia bersama. Tindakan politik menurut Hannah Arendt adalah “ruang di antara” yang menghubungkan seorang manusia dengan sesamanya. Dalam pandangannya tentang aktivitas tindakan, Arendt menandakan beberapa tujuan yakni terciptanya ruang publik, dunia bersama, kesetaraan dan kebebasan manusia. Menurut Arendt, dunia bersama merupakan dunia yang berada di luar ruang privat manusia. Dunia bersama diciptakan oleh pluralitas manusia dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa politik hanya eksis apabila manusia bersatu dalam tindakan maupun pembicaraan mengenai persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Dalam konteks persoalan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menimbulkan krisis dalam kehidupan bersama, Arendt menandakan bahwa hanya dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dan menciptakan ruang publik yang adil, manusia dapat memperoleh kebebasan untuk berpikir dan bertindak untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Kata Kunci: Tindakan Politik, Korupsi, Dunia Bersama, Ruang Publik, Tanggung Jawab.

Abstract

Legisius Oki. 19.75.6618. *Observing the Corruption Issues in East Nusa Tenggara Province in the Light of Hannah Arendt's Theory of Political Action*. Thesis. Undergraduate Program, Theological Studies Program – Philosophy of Catholic Religion, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2023.

The purposes this thesis are: *first*, to describe and explain Hannah Arendt's views on political action; *second*, to explain the corruption issues in East Nusa Tenggara Province; *third*, to implement Hannah Arendt's political action theory on political life and corruption issues in East Nusa Tenggara Province. The focus of the author in writing this thesis is to observe the problem of corruption in East Nusa Tenggara Province in the light of Hannah Arendt's theory of political action. The author uses qualitative methods in the process of compiling this thesis. The main source for writing this thesis is a book by Hannah Arendt entitled *The Human Condition*. In addition, the authors also use other sources such as; books, scientific journals, dictionaries, and the internet.

Based on the theoretical study, there are several important findings. *First*, one of the biggest threats to socio-political life in East Nusa Tenggara Province is the rampant acts of corruption committed by public officials. The problem of corruption is essentially caused by the failure to think and act as public officials. In addition, corruption is also the result of abuse of power by public officials. The corruption that gave rise to crimes against fellow human beings in socio-political life once were practiced by the Nazi totalitarian regime to alienate and destroy the Jewish people in Germany. Acts of crime that ravage social and political life are still found in East Nusa Tenggara Province, which is well-known as corruption.

Second, the corruption damages the public space or the shared world known as East Nusa Tenggara Province. Therefore, to overcome this, public officials and the people of East Nusa Tenggara must develop the habit of critical thinking and a sense of responsibility towards the world together. Building critical thinking skills and a sense of responsibility is a key concept for Hannah Arendt when it comes to political action and the world together. Political action according to Hannah Arendt is the "space between" that connects a human being with his fellow human beings. In his views on action activities, Arendt emphasizes several goals, namely the creation of public space, a shared world, equality, and human freedom. According to Arendt, the shared world is a world that is outside the human private sphere. The shared world was created by a plurality of people to ensure the survival of humans as individuals and as members of society. This view emphasizes that politics only exists when humans unite in actions and talk about the problems they face.

In the context of the problem of corruption in East Nusa Tenggara Province which has created a crisis in shared life, Arendt emphasized that only by developing critical thinking skills, increasing a sense of responsibility for shared life, and creating a just public space, humans can gain the freedom to think and act to realize shared goals.

Keywords: Political Action, Corruption, Shared World, Public Space, Responsibility.